



PIDATO

**PIMPINAN PADA RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA
BARAT DENGAN ACARA PENYERAHAN LHP BPK RI ATAS LKPD
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 DAN KINERJA ATAS
UPAYA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENANGGULANGI
KEMISKINAN PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021**

JUMAT, 20 MEI 2022

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

- YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT**
- YTH. SDR. STAF AHLI BPK RI BESERTA ROMBONGAN**
- YTH. SDR. FORKOPIMDA PROVINSI SUMATERA BARAT**
- YTH. SDRI.KEPALA PERWAKILAN BPK PROVINSI SUMATERA BARAT,
BESERTA JAJARAN**
- YTH. SDR. WAKIL-WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**
- YTH. SDR. KETUA-KETUA FRAKSI, KETUA-KETUA KOMISI, KETUA
BAPEMPERDA, KETUA BADAN KEHORMATAN**
- YTH. REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**
- YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, PIMPINAN
OPD DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**
- YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.**

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah
SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada

siang hari ini, kita dapat kembali hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan Rapat Paripurna Dewan dengan agenda “ Penyerahan LHP BPK atas LKPD tahun 2021 dan LHP Kinerja atas Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021“.

Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada Bapak NOVIAN HERO DWIYANTO, STAF AHLI BPK RI yang telah berkenan langsung menyerahkan LHP BPK atas LKPD Tahun 2021 kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Sdr. Gubernur, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat, Pimpinan dan Anggota DPRD serta undangan sekalian yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada siang hari ini.

Dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim” Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada siang Hari ini, Jum’at, 20 Mei 2022, dengan agenda Penyerahan LHP BPK atas LKPD Tahun 2021 dan LHP Kinerja atas Penanggulangan Kemiskinan Pada Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2021, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketukan Palu 3 Kali).

Sdr. Gubernur, Rapat Paripurna dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2004, dijelaskan bahwa keuangan daerah harus di kelola secara akuntabel, transparan dan professional dengan memperhatikan kaidah dan standar tata Kelola keuangan daerah agar menghasilkan output dan outcome yang lebih efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan daerah perlu di awasi untuk memastikan apakah telah digunakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK dan DPRD memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan lingkupnya masing-masing. Oleh sebab itu, pengawasan oleh BPK dan pengawasan oleh DPRD pada prinsipnya, saling mendukung dan saling melengkapi.

Salah satu wujud pelaksanaan fungsi pengawasan BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan DPRD kemudian menindaklanjuti LHP tersebut sesuai dengan kewenangan DPRD.

Sejalan dengan perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pengawasan terhadap tata kelola keuangan juga perlu dikembangkan. Audit terhadap keuangan daerah tidak hanya melihat pada tataran output saja, akan tetapi perlu di lihat juga pada tataran outcomenya. Apakah kegiatan dan anggaran yang digunakan, telah memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kondisi ini dapat dilihat dari tata kelola keuangan daerah yang terjadi selama ini. Realisasi anggaran sudah cukup tinggi dan tidak ada permasalahan dalam pelaksanaannya, akan tetapi dampak yang dirasakan oleh masyarakat relatif kecil sekali dan banyak target kinerja dalam RPJMD yang tidak tercapai.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami Hormati;

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2006, bahwa salah satu kewenangan BPK adalah melakukan audit terhadap laporan keuangan daerah. Dari audit yang dilakukan tersebut, BPK akan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Opini tertinggi dari audit yang dilakukan oleh BPK terhadap LKPD adalah “ Wajar Tanpa Pengecualian “ atau WTP. Banyak Pemerintah Daerah yang euforia dari opini WTP yang diberikan oleh BPK dan berlomba-lomba mendapatkan opini WTP tersebut. Hal ini menurut hemat kami merupakan pemahaman yang salah, oleh karena opini WTP adalah merupakan standar minimal yang harus dipenuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh Pemerintah Daerah atau dengan kata lain, bukanlah sebuah prestasi yang luar biasa.

Banyak contoh kasus, hasil audit BPK terhadap LKPD adalah opini “ WTP “, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan masih banyak temuan dan pelanggaran

terhadap peraturan perundangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan bahkan tidak jarang temuan tersebut, bersifat berulang.

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang kami Hormati;

Dalam 9 tahun terakhir, opini terhadap LKPD Provinsi Sumatera Barat selalu mendapatkan “WTP” ini tentu sebuah prestasi yang luar biasa dalam pengelolaan keuangan daerah dilingkup Pemerintah Daerah. Capaian opini “ WTP “ tersebut, tentu tidak terlepas dari dukungan dan supervisi yang diberikan oleh BPK kepada OPD-OPD dilingkup Pemerintah Daerah, termasuk umpan balik dari pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat atas dukungan dan supervisi yang diberikan dalam perbaikan tata Kelola keuangan daerah dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kita tentu berharap, opini yang diberikan oleh BPK terhadap LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, tetap “ Wajar Tanpa Pengecualian “ atau WTP.

Sdr. Gubernur dan hadirin yang kami Hormati;

Selain penyerahan LHP atas pemeriksaan LKPD Tahun 2021, pada kesempatan ini Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat, juga akan menyerahkan kepada DPRD dan Gubernur, LHP Kinerja Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. LHP Kinerja tersebut, disajikan berupa *Long Form Audit Report (LFAR)*, yaitu pengujian atas efektivitas upaya pemerintah daerah menanggulangi kemiskinan Tahun Anggaran 2021. Pemeriksaan kinerja terhadap penanggulangan kemiskinan tersebut, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan, sebagai pengantar Rapat Paripurna ini. Selanjutnya kita akan mengikuti rangkaian acara dalam

penyerahan LHP BPK tersebut yang nantinya akan dipandu oleh protokol.

Untuk itu, kepada protokol kami persilahkan memandu penyerahan LHP BPK ini.

.....

(Penyerahan LHP BPK)

.....

Lanjutan

Sdr. Gubernur, Rapat Paripurna yang kami Hormati;

Kita sama-sama telah menyaksikan penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan LHP Kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Menanggulangi Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021.

Terhadap LHP atas LKPD Tahun 2021, BPK kembali memberikan opini “ WTP “ atas kinerja pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat mempertahankan opini “ WTP “ dan merupakan capaian yang ke 10.

Untuk itu, kami dari DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan ucapan selamat kepada Sdr. Gubernur beserta jajarannya, atas capaian opini WTP tersebut. Capaian opini WTP tersebut, hendaknya dapat menjadi cambuk oleh Pemerintah Daerah untuk lebih memantapkan tata Kelola

keuangan daerah dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Namun perlu menjadi catatan dan perhatian kita semua, bahwa opini “ WTP “ bukanlah merupakan jaminan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Masih terdapat beberapa catatan dan rekomendasi BPK yang perlu ditindak lanjuti oleh pihak-pihak terkait.

Hal ini perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan temuan atau rekomendasi BPK tersebut, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2010, DPRD sesuai dengan kewenangannya yang diwakili oleh Komisi-komisi akan melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut dan disamping itu, Komisi-Komisi juga dapat mendalami substansi yang terdapat dalam LHP tersebut, baik terhadap

tata kelola keuangan OPD, pelaksanaan tindak lanjut LHP tahun sebelumnya serta rencana aksi masing-masing OPD untuk penyelesaian tindak lanjut LHP tersebut.

Sdr. Gubernur, Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Dengan telah diserahkannya LHP BPK atas LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan LHP Kinerja atas penanggulangan Kemiskinan pada Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada siang hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kita tutup, izinkan kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, kembali menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya, atas dukungan dan supervisi yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah dan Kerjasama yang dibangun dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Ke depan, dengan dukungan, supervisi dan Kerjasama yang sudah terjalin selama ini, perlu lebih ditingkatkan lagi sejalan dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak pada tempatnya.

Akhirnya dengan mengucapkan “ Alhamdulillahhirabbilalamin “ Rapat Paripurna Dewan pada Hari ini secara resmi kita tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

Terima kasih.

Billahitaufiqwalhidayah

Wss.wbb.